



RELEVANSI ETIKA POLITIK PETER L. BERGER BAGI PEMBANGUNAN PARIWISATA DI INDONESIA

Bernardus Badj

Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif (IFTK) Ledalero, Maumere, NTT

EmailKorespondensi: rolinjanuari@gmail.com

Received: March 17, 2024

Accepted: September 12, 2024

Published: October 26, 2024

Abstract

*This paper discusses the relevance of Peter L. Berger's political ethics, particularly in his development theories, to the tourism industry in Indonesia, with a focus on Labuan Bajo, West Manggarai in NTT. Tourism development in Indonesia aims to improve both the quality and quantity of tourist destinations while fostering an industry that drives the national economy. While these efforts have largely been successful, in some areas, like NTT, tourism development has led to issues such as domination, resource grabbing, marginalization, subordination, exploitation, and violence. Berger, in his book *Pyramid of Sacrifice*, introduces a moral dimension to political decisions, emphasizing the importance of considering the costs for others. He highlights the "calculus of pain" and the "calculus of meaning" as key aspects politicians must assess. Interestingly, tourism also presents a new context for the Catholic Church's pastoral work. As a result, the Church is called upon to play an active role in guiding tourism development to ensure shared prosperity and justice. This paper uses a literature-based approach to contribute to the nation's welfare in all aspects of life.*

Keywords: *Political ethics, development tourism, the catholic church*

Abstrak

*Tulisan ini membahas relevansi etika politik Peter L. Berger, khususnya dalam teori pembangunannya, dalam industri pariwisata di Indonesia, dengan fokus pada Labuan Bajo, Manggarai Barat di NTT. Pengembangan pariwisata telah menyebabkan masalah seperti dominasi, perampasan sumber daya, marginalisasi, subordinasi, eksploitasi, dan kekerasan. Berger, dalam bukunya *Pyramid of Sacrifice*, memperkenalkan dimensi moral pada keputusan politik, menekankan pentingnya mempertimbangkan biaya bagi orang lain. Gereja dipanggil untuk memainkan peran aktif dalam membimbing pengembangan pariwisata untuk memastikan kemakmuran dan keadilan bersama. Makalah ini menggunakan pendekatan berbasis literatur untuk berkontribusi pada kesejahteraan bangsa dalam semua aspek kehidupan.*

Katakunci: *Etika politik, pembangunan pariwisata dan gereja katolik.*



A. Pendahuluan

Diskursus tentang pembangunan (development)¹ menjadi salah satu persoalan yang banyak dikaji pada dua dekade terakhir. Pembangunan sering kali diklaim sebagai suatu proses yang bertujuan untuk memanusiakan manusia dan dunianya. Ada pun konsep atau model pembangunan yang diyakini hanya terarah pada prinsip yang menjadi konsensus sebuah komunitas politik, yakni upaya mencapai kesejahteraan umum (*common good*). Dalam artian bahwa, konsep atau model pembangunan sesungguhnya harus menunjang harkat (*preis*) dan martabat (*wurde*) manusia secara universal. Pembangunan harus mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan bersama sebab indikator yang valid untuk menggambarkan kesejahteraan sosial masyarakat sebagai tujuan komunitas politik adalah pembangunan.²

Berkaitan dengan hal tersebut, pembangunan dan perkembangan pariwisata di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia saat ini dikategorikan sebagai suatu permasalahan etika politik. Manusia sebagai individu dalam masyarakat yang menjadi muara dan target pembangunan pariwisata di Labuan Bajo, justeru dilecehkan dan dieksplotasi sebagai sarana belaka untuk kepentingan sesaat. Karena itu, Emanuel Kant jauh-jauh hari telah memberikan peringatan dengan menegaskan bahwa manusia harus dihormati karena manusia adalah satu-satunya makhluk yang merupakan tujuan pada dirinya sendiri. Sikap hormat tak bersyarat ini dituntut oleh kodrat manusia sebagai *persona*, pusat kemandirian, berakal budi, berkehendak dan memiliki *preis and wurde*³ bukan untuk diperlakukan sebagai sarana belaka dalam pembangunan.

Tujuan tulisan ini untuk mendiskusikan relevansi etika politik pembangunan Peter L. Berger terhadap pembangunan dan perkembangan pariwisata di Indonesia pada umumnya dan NTT khususnya di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Peter L. Berger⁴ menegaskan bahwa pembangunan mesti memperhitungkan biaya-

¹ Pembangunan mengacu pada proses menuju perkembangan atau berkembang ke arah yang lebih baik secara ekonomi, politik sosial dan budaya. perkembangan berhubungan dengan pertumbuhan sosial ekonomi sesuai dengan aspek-aspek pengukuran yang digunakan di dalamnya. Secara sederhana pembangunan dalam pembahasan ini mengacu pada sebuah proses politik penyusunan kebijakan dalam publik (*public policy*) yang mengacu pada kesejahteraan dan kemakmuran. Pembangunan sesungguhnya berkaitan dengan banyak isu seperti kemiskinan, kerusakan lingkungan hidup, akses sosial ke dalam jaringan kebijakan publik, politik pendidikan yang tidak adil, kemerdekaan gender dan isu-isu sentral lainnya. Max Regus "Membongkar Aib Pembangunan" dalam Paul Budi Kleden, Otto Gusti Madung, dan Anselmus Meo (ed). *Allah Menggugat Allah Menyembuhkan* (Maumere: Penerbit Ledalero, 2012), hlm. 369

² M. Sastraprateja et al. (ed.), *Menguak Mitos-Mitos Pembangunan* (Jakarta: Gramedia, 1986), hlm. x.

³ Frans Ceunfin, "Etika", (ms), (Maumere: IFTK Ledalero, 2013).

⁴ Peter Lidwig Berger lahir di Wien-Austria pada 17 Maret 1929, dibesarkan di Wina dan bermigrasi Amerika Serikat pasca Perang Dunia II. Menjadi Profesor Sosiologi dan Teologi di Universitas Boston, dan sejak 1985, Berger menjadi direktur dari

biaya manusia yaitu *Pertama*, “perhitungan penderitaan” (*calculus of pains*). Perhitungan penderitaan yang dimaksudkan oleh Berger merujuk pada berbagai penderitaan fisik yang kerap muncul akibat pembangunan seperti: kemiskinan, ketidakadilan, ketidakmerataan pendapatan, dan penindasan. *Kedua* “perhitungan makna” (*calculus of meaning*). Perhitungan makna yang dimaksudkan Berger merujuk pada pertimbangan hilangnya makna atau pengetahuan masyarakat atas kearifan lokal, kebudayaan dan peradaban yang mereka miliki.

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis akan menunjukkan pendekatan positif dan negatif terhadap pembangunan pariwisata. Namun pendekatan negatif yang menempatkan penderitaan sebagai dalil utama pembangunan akan menjadi konsep utama dalam pembahasan ini.

B. Metode

Dalam proses penyelesaian tulisan ilmiah ini, penulis sepenuhnya menggunakan metode kajian kepustakaan. Dalam metode ini, penulis berusaha untuk mencari dan meramu berbagai buku, literatur-literatur serta artikel-artikel ilmiah yang mempunyai hubungan erat dengan judul atau tema yang didalami oleh penulis. Selain itu, penulis juga memakai berbagai sumber lain yang mutakhir yang digunakan saat ini yakni internet. Sumber ini digunakan oleh penulis untuk mengakses berbagai hal-hal aktual yang berkaitan dengan tema dari tulisan ilmiah ini.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pembangunan Parawisata di Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), dan sumber daya budaya (SDB) yang cukup besar untuk pembangunan dan pengembangan pariwisata.⁵ Hal ini merupakan aset penting dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata. Ada cukup alasan karena pariwisata merupakan alat pelestarian alam dan budaya. Pariwisata dapat dilihat sebagai instrumen paling menarik untuk melestarikan dan memperkenalkan hasil alam dan budaya Indonesia. Karena itu, peran serta atau keterlibatan masyarakat dalam

Institut Studi Kebudayaan Ekonomi, yang beberapa tahun lalu berubah menjadi Institut Kebudayaan, Agama, dan Masalah Dunia. Berger juga pernah menjabat sebagai *President for “The Society for the Scientific Study of Religion”*. Sampai saat ini, Berger menjadi profesor di Universitas Boston, Amerika Serikat. Bukunya yang paling terkenal ialah *Piramida Kurban Manusia: Etika Politik dan Perubahan Sosial*. Bdk Peter L. Berger, *Piramida Kurban Manusia: Etika Politik dan Perubahan Sosial* penerj. A. Rahman Toleng (Jakarta: Penerbit Pustaka LP3ES, 2004), hlm. Viii-ix.

⁵ Prof. Dr. Hj. Sedarmayanti, Drs. H. Gumelar S. Sastarayuda, dan Lia Afriza, *Pembangunan dan Pengembangan Pariwisata* (Bandung: Percetakan Refika Aditama, 2021), hlm. 35.

pembangunan pariwisata merupakan faktor penentu. Partisipasi masyarakat secara nyata sangat dibutuhkan untuk dapat mewujudkan pariwisata yang dikehendaki bersama.⁶

Dasar hukum pembangunan kepariwisataan di Indonesia yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata. Pelaksanaan pembangunan kepariwisataan harus memperhatikan keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata. Hal tersebut merupakan pelaksanaan lanjutan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 50, Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata, mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional, dan mengembangkan kelembanggaan kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu menyinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan industri pariwisata secara professional, efektif dan efisien.⁷

Berdasarkan produk hukum tersebut, pembangunan pariwisata di Indonesia dipahami sebagai bagian integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan secara kontinyu untuk mewujudkan peningkatan kepribadian dan kemampuan manusia dan masyarakat Indonesia. Hal ini dapat terlaksana jika manusia Indonesia memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Dalam artian bahwa perkembangan kepariwisataan di Indonesia harus selalu merujuk pada norma agama dan nilai budaya pada setiap segi kehidupan. Norma dan nilai tersebut dapat mewarnai perilaku perkembangan kepariwisataan nasional dalam rangka mewujudkan ideologi, politik, ekonomi dan sosial.⁸ Hal ini merupakan keunggulan komperatif pembangunan pariwisata di Indonesia.

Pariwisata juga memberikan andil besar dalam pembangunan nasional karena pariwisata merupakan salah satu sumber devisa untuk pemerataan dan peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan, memperkuat persatuan dan kesatuan, serta memperkenalkan dan melestarikan budaya bangsa. Selain itu, Indonesia juga mempunyai potensi alam dan seni budaya yang dapat dimanfaatkan oleh daerah-daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).⁹ Apabila dikelola dan direncanakan dengan baik akan mempunyai peranan yang besar dalam menunjang pencapaian tujuan nasional yakni meningkatkan kesejahteraan, kebahagiaan,

⁶ Nugroho SBM, "Beberapa Masalah Dalam Pengembangan Sektor Pariwisata Di Indonesia", *Jurnal Pariwisata*, 7:2 (Semarang: Agustus 2020) hlm. 127-128. <http://ejournal.bsi.ac.id/ejournal/index.php/jp.pdf> (diakses pada tanggal, 28 Februari 2024).

⁷ Prof. Dr. Hj. Sedarmayanti, Drs. H. Gumelar S. Sastarayuda, dan Lia Afriza, *Op.cit.*, hlm. 24-25.

⁸ *Ibid.*

⁹ Fredrick Hendrick Mebri, Ermaya Suradinata, dan Kusworo, "Strategi Pengembangan Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Jayapura Provinsi Papua", *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 12:1 (Jayapura, Mei 2022), hlm. 102.

kemakmuran, dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Namun jika dikelola secara salah maka pembangunan pariwisata hanya mendatangkan penderitaan, kemiskinan, kemelaratan, dan ketidakadilan sosial bagi masyarakat. Oleh sebab itu, pembangunan pariwisata di negeri ini diharapkan mampu memberikan kontribusi secara adil bagi semua warga bangsa. Dengan demikian, orang-orang yang menjadi korban pembangunan pariwisata harus mendapatkan prioritas lebih tinggi guna memanfaatkan hasil-hasil pembangunan kepariwisataan termasuk menikmati manfaat ekonomi kepariwisataan itu sendiri.

2. Perkembangan Pariwisata di Indonesia

Perkembangan pariwisata di Indonesia secara menyeluruh merupakan hasil kerja dari berbagai elemen bangsa. Elemen-elemen bangsa dimaksud yaitu pemerintah baik pusat maupun daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan masyarakat yang konsen dan peduli pada bidang pariwisata. Semua elemen ini bergerak pada perekonomian yang sangat luas, dan tidak semata-mata terkait dengan peningkatan kunjungan wisatawan, namun yang lebih penting adalah perkembangan pariwisata yang mampu membangun semangat kebangsaan dan apresiasi terhadap kekayaan seni dan budaya bangsa.¹⁰

Perkembangan sektor pariwisata pada saat ini telah menjadi sebuah industri.¹¹ Hal ini dikarenakan aktivitas pariwisata tersebut secara ekonomi telah menciptakan permintaan untuk memenuhi keperluan pasar baik barang maupun jasa. Barang dan jasa serta pelayanan harus diarahkan untuk menarik minat wisatawan baik domestik maupun manca negara. Standar pelayanan ini harus diperhatikan secara serius untuk membuat wisatawan mau berkunjung ke obyek-obyek wisata yang ada. Pelayanan yang diberikan bukan hanya sekedar untuk menunjukkan keindahan alam atau kekhasan budaya saja, akan tetapi pelayanan itu juga harus memperhatikan kelengkapan sarana dan prasarana yang ada, produk cinderamata yang unik, perhotelan, makanan khas ataupun biro perjalanan.

Perkembangan industri pariwisata ini secara tidak langsung menimbulkan dampak atau manfaat multi ganda (*multiplier effect*) bagi negara, pemerintah daerah dan masyarakat. Selain mendatangkan devisa bagi negara dan meningkatkan pendapatan daerah, pengembangan industri pariwisata di tanah air ternyata dapat meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat. Industri pariwisata membantu membuka dan memperluas kesempatan kerja terutama bagi masyarakat

¹⁰ Yati Heryati, "Potensi Pengembangan Obyek Wisata Pantai Tapandullu Di Kabupaten Mamuju", *GROWTH Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1:1 (Mamuju, 2019) hlm. 56-57.

¹¹ Moh. Hasan Basri, "Pengembangan Pariwisata Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Sumenep", *Jurnal Ilmiah Muqoddimah*, 3:2 (Surabaya, Agustus 2019), hlm. 57.

yang berada di sekitar daerah tujuan wisata. Hal ini sesuai semangat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, yang menentukan bahwa salah satu tujuan kepariwisataan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.¹²

Selanjutnya, kawasan wisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sehingga menjadi sasaran wisata. Unsur ini terdiri atas dua bagian yaitu politik pemerintah yang langsung yaitu politik yang memengaruhi perkembangan pariwisata di Negara tersebut, dan politik pemerintah yang tidak langsung, yaitu politik yang tidak secara langsung memengaruhi perkembangan pariwisata. Hal ini berkaitan dengan keadaan atau kondisi sosial, ekonomi dan politik setempat. Dasar paling hakiki yang melahirkan pariwisata adalah perasaan manusia yang selalu ingin mengetahui segala sesuatu selama hidupnya. Sifat ramah-tamah juga merupakan peluang untuk perkembangan pariwisata.¹³

Peluang perkembangan sektor pariwisata tersebut didukung oleh beberapa fakta, antara lain gaya hidup masyarakat modern yang lebih gandrung untuk berwisata. Wisatawan mancanegara sendiri telah menjadikan Indonesia sebagai destinasi wisata. Pertimbangan rasional bahwa Indonesia selalu menarik untuk dikunjungi karena kekhasan alamnya yang indah, keramah-tamahan penduduknya terhadap tamu yang datang, dan kekhasan budaya lokalnya. Oleh karena itu, sektor pariwisata sangat diandalkan sebagai sektor alternatif untuk mendorong pertumbuhan dan peningkatan perekonomian Indonesia dalam berbagai dimensi kehidupan. Sumbangsih pariwisata nasional antara lain meningkatnya Produk Domestik Bruto (PDB), penerimaan devisa, dan penyerapan tenaga kerja.¹⁴

Hal yang mesti diafirmasi yaitu pembangunan dan perkembangan pariwisata di Indonesia telah terbukti berpengaruh positif terhadap perekonomian Negara. Hal tersebut diperoleh dari pendapatan nilai tukar *valuta* asing, penerimaan devisa akibat adanya konsumsi wisatawan, penyerapan tenaga kerja, pembangunan infrastruktur pariwisata yang turut dinikmati oleh masyarakat lokal, dan di beberapa destinasi pariwisata juga sebagai generator pemberdayaan perekonomian masyarakat lokal. Sayangnya, semua aspek positif tersebut masih meninggalkan sisi negatifnya. Hal ini nampak pada pembangunan pariwisata di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Pembangunan dan perkembangan pariwisata di Labuan Bajo justeru telah mendatangkan penderitaan, kemiskinan, ketidakadilan sosial, dan marginalisasi di

¹² *Ibid.*, hlm. 61-62.

¹³ Drs. Heru Gunawan, "Strategi Pengembangan Pariwisata Bandungan Kabupaten Semarang", *Jurnal Widya Praja*, 2:1 (Semarang, Juni 2022) hlm. 51-52.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 58.

kalangan masyarakat lokal. Pembangunan pariwisatanya dinilai hanya bersifat pragmatis belaka.

3. Krisis Pembangunan Pariwisata di Labuan Bajo, Manggarai Barat

Secara sosial pembangunan tidak selamanya dapat membahagiakan dan menyejahterakan manusia. Hal ini terjadi juga di Labuan Bajo, Manggarai Barat. Pemerintah pusat sedang giat-giatnya menggerakkan seluruh pikiran, tenaga dan biaya untuk membangun dunia pariwisata di Labuan Bajo, setelah Denpasar, Bali. Pemerintah pusat pun telah menetapkan Labuan Bajo sebagai tujuan wisata super premium. Ini berarti pemerintah pusat mau mengembangkan pusat pembangunan baru, pusat ekonomi baru di Indonesia.¹⁵ Dalam konteks ini, pemerintah pusat pun mengembangkan kelembagaan kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu menyinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan industri pariwisata secara profesional, efektif dan efisien. Sayangnya, kenyataan tersebut hanya melahirkan dominasi, pencaplokan sumber daya, marginalisasi, subordinasi, dan eksploitasi.

Pembangunan pariwisata tentu saja harus meliputi tiga aspek ini, yaitu ekonomi, politik dan budaya karena ketiganya saling terkait satu sama lain. Hal yang sama pun harus nampak dalam pembangunan pariwisata Labuan Bajo. Status spesial pariwisata Labuan Bajo harus menjadikannya sebagai area yang tidak hanya dibanjiri oleh arus modal para investor, tetapi juga arus penyebaran pengaruh agama dan kebudayaan asing, pandangan hidup, pola hidup dan gaya hidup, serta sisi kelam dari pariwisata seperti industri seks, perdagangan narkoba dan lain-lain. Tentu saja kondisi ini memuat potensi konflik yang tak dapat dihindari.¹⁶

Pertanyaan yang perlu direfleksikan adalah untuk kepentingan siapa pembangunan pariwisata Labuan Bajo dilaksanakan secara besar-besaran? Di sini semakin jelas bahwa pembangunan yang bersifat ideologis tidak ada banyak gunanya. Sebab segala upaya pembangunan hanya akan menguntungkan segelintir orang yaitu kaum elitis, dan para penguasa sendiri. Sedangkan rakyat kecil hanya digunakan sebagai dalih oleh penguasa untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Misalnya, telah terjadi cara-cara penyingkiran masyarakat lokal di Labuan Bajo, salah satunya melalui turisme. Pertanyaannya, apakah turisme sebagai akhir atau pintu utamanya? Setelah menjadi kota tujuan pariwisata di Indonesia dan dunia, wisatawan

¹⁵ Selivino Koe Baghi (ed), "Tumbul-tumbul Pembangunan: Kontroversi Pariwisata Super Premium Labuan Bajo" <http://ekorantt.com/2020/10/03/tumbal-tumbal-pembangunan-kontroversi-pariwisata-super-premium-labuan/bajo/> (diakses pada tanggal 27 Januari 2024).

¹⁶ Mathias Daven, "Globalisasi dan Pariwisata Sebagai Fenomen Kebudayaan" (Jakarta: Penerbit Obor, 2023) <http://repository.iftkledalero.ac.id/id/eprint/1461.pdf> (diakses pada tanggal 03 Maret 2024).

baik lokal maupun asing, ramai-ramai mengeluarkan banyak dana untuk menikmati keindahan alam dan binatang komodo di Labuan Bajo. Karena itu, pariwisata Labuan Bajo tidak hanya menjadi ikon dan kebanggaan masyarakat lokal, akan tetapi kondisi tersebut sangat rawan bagi terjadinya konflik-konflik berkaitan dengan sumber-sumber penghidupannya. Ini sebuah ancaman serius yang mesti diwaspadai sejak dini.

Sekilas dapat diuraikan bahwa pada tahun 1980, Pulau Komodo menjadi Taman Nasional Komodo (TNK). Tujuannya untuk melestarikan binatang Komodo (*Varanus Komodoensis*) dan habitatnya. Enam tahun kemudian, TNK oleh UNESCO ditetapkan menjadi *World Heritage Site* dan *Man and Biosphere Reserve*. Sejak ditetapkan menjadi TNK, pada tahun 1999 tingkat kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo, Manggarai Barat meningkat sangat signifikan. Data menunjukkan TNK menerima kunjungan 30.000 wisatawan per tahun (11%).¹⁷

Selain kawasan TNK, Labuan Bajo juga mempunyai kekayaan alam lainnya yang sangat menawan yaitu gugusan pulau dan pesisir pantai. Semua ini semakin menarik wisatawan untuk datang ke Labuan Bajo. Pembangunan besar-besaran pun terjadi di Labuan Bajo. Jalur-jalur transportasi darat diperbaiki (trans Flores). Jalanan di pusat kota di Labuan Bajo disulap menjadi begitu mulus, semulus keuntungan yang didapatkan oleh segelintir orang. Hotel-hotel tumbuh subur di Kota Labuan Bajo dan pulau-pulau sekitarnya. Sementara itu, sarana dan prasarana transportasi udara di Bandara Udara Labuan Bajo juga didesain dan dibangun dengan skala internasional. Bandara Komodo kini hadir dengan tampilan baru dan megah. Banyak moda transportasi udara seperti Air Asia, Garuda Airline, Batik Air, Citilink, Lion Air, Super Jet, dan Wings Air setiap hari melayani para wisatawan berkunjung ke Labuan Bajo.

Pertanyaannya, untuk siapa Bandara Internasional Komodo dibangun? Apakah hal ini untuk menunjang para wisatawan asing ataupun para investor asing agar dapat dengan mudah meraup keuntungan ekonomis di Labuan Bajo? Pernyataan ini merupakan sebuah ironi karena masyarakat di Labuan Bajo bahkan Manggarai Barat tidak akan semuanya menikmati dan merasakan fasilitas Bandara Komodo yang megah. Lalu, siapa yang menguasainya dan siapa yang diuntungkan? Siapa yang dikorbankan?¹⁸

Kawasan TNK yang menjadi *icon* Labuan Bajo, bahkan Nusa Tenggara Timur itu pun menuai konflik antara warga yang tinggal berdekatan dengan kawasan TNK. Salah satunya warga di Desa Papagarang (nelayan). Mereka biasa menangkap ikan hingga ke Pulau Komodo, bahkan sampai ke Bima.¹⁹ Di sinilah awal mula

¹⁷ Sityi M. Qori'ah "Marginalisasi di Kota Labuan Bajo" dalam *Pariwisata, Pembangunan, dan Keadilan Agraria di Flores* (Manggarai Barat: Penerbit Divisi Riset dan Publikasi Sunspirit for Justice and Peace, 2016), hlm. 32.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 33-34.

penyingkiran masyarakat setempat. Jelaslah, bahwa yang dikorbankan dengan adanya pariwisata di Labuan Bajo adalah masyarakat lokal.

Selain itu, masyarakat lokal juga tidak memperoleh fasilitas publik, seperti sekolah, air bersih, dan sertifikat tanah. Bahkan mereka pun merasakan bahwa keberadaan desanya di dalam kawasan TNK merupakan sebuah kesengsaraan, karena mereka sama sekali tidak diuntungkan oleh adanya pariwisata di Labuan Bajo. Hal ini menegaskan bahwa pihak yang diuntungkan adalah korporasi-korporasi dan investor asing.

Permasalahan lain yang dialami masyarakat lokal adalah krisis air minum. Air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) milik pemerintah lebih banyak dialirkan ke hotel-hotel besar. Air itu selain digunakan untuk minum, air juga digunakan untuk kolam renang dan berbagai kolam hias milik hotel. Masyarakat lokal semakin kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Bahkan mereka harus membeli air yang dijual menggunakan mobil tengki dari pengusaha-pengusaha air swasta dengan harga yang mahal.²⁰ Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan pada akhirnya hanya melahirkan dominasi, pencaplokan sumber daya, marginalisasi, subordinasi, eksploitasi, dan kekerasan dalam berbagai bentuknya.

4. Relevansi Etika Politik Peter L. Berger

4.1 Pembangunan Menurut Kapitalisme

Gagasan kapitalisme tentang pembangunan, menurut Berger pada dasarnya merupakan suatu proyeksi universal dari impian Amerika, impian ini akan sesuatu ekonomi yang berlimpah dalam kerangka demokrasi politik pada suatu masyarakat kelas yang dinamis. Karena itu, bagi para pemimpin Dunia Ketiga yang percaya pada cara pembangunan ini, mereka menjanjikan kepada rakyat mereka akan adanya keberlimpahan materiil dan kebebasan politik. Namun bagi Berger, gagasan tentang pembangunan kapitalis di Dunia Ketiga yang dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat umum adalah sebuah mitos²¹. (Mitos pertumbuhan yang tertanam dalam sebuah mitologi kemajuan dan modernitas yang menyeluruh).²²

²⁰ Benny Denar, "Sisi Antagonis Pembangunan dan Opsi Dekolonial Dalam Teologi Katolik" dalam Mathias Daven dan Georg Kirchberger (ed.) *Hidup Sebuah Pertanyaan Kenangan 50 Tahun STFK Ledalero* (Maumere: Penerbit Ledalero, 2019) hlm. 459.

²¹ Mitos yang dimaksud dalam pembangunan ialah pembawa-pembawa manusiawi. Mereka adalah kaum usahawan, kaum insinyur, dan para ahli teknis lainnya, serta berbagai jenis "isengur sosial" (sebagian besar dari mereka di dalam birokrasi politik atau swasta. Dalam masyarakat kapitalis mereka, meliputi aneka ragam orang dari "teknostuktur-teknostuktur. Orang-orang inilah yang membawa mitos pertumbuhan dalam Dunia Ketiga. Peter L. Berger, *Op.cit.*, hlm. 12-14.

²² Sirilus Stefanus Bau "Etika Politik Pembangunan Menurut Peter L. Berger. (Skripsi Sarjana, IFTK Ledalero, Maumere, 2022), hlm. 34-35.

Menurut Berger, hakekat mitos pertumbuhan adalah “pemujaan barang”. Posisi ini memunculkan pertanyaan serius, apakah pertumbuhan tanpa batas merupakan tujuan yang berguna, menurut ukuran ekonomi sekalipun. Dapatkah pertumbuhan dibiarkan liar dan harus membutuhkan biaya sosial dan ekologis yang tinggi? Mungkin impian pertumbuhan ini berlebihan. Namun pesannya adalah pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan aspek-aspek lain dari kehidupan manusia, akan membawa kesengsaraan bagi manusia itu sendiri.

Untuk mengkritik model-model kapitalis tersebut, Berger mengajukan satu pertanyaan yakni siapa yang mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan tersebut? Dalam menjawab pertanyaannya Berger menyatakan bahwa:

kecenderungan-kecenderungan dalam Dunia Ketiga memperlihatkan bahwa kaum miskin tidak mendapatkan apa pun: efek menetes ke bawah (*trickle down effect*) atau dalam rumusan yang lebih optimis pengaruh yang menyebar (*spread effect*) tidak dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Dunia Ketiga. Di kebanyakan negara-negara Dunia Ketiga, telah ada peningkatan dalam polarisasi pendapatan dan kesejahteraan. Masyarakat kelas bawah justru semakin tidak mendapatkan apa-apa dari pertumbuhan yang terjadi. Ada peningkatan yang signifikan dalam jumlah kelaparan, penyakit, dan pengangguran. Atau dengan kata lain, kue ekonomi semakin membesar, maka kelas bawah tidak hanya memperoleh potongan kue yang lebih besar, tetapi mereka akan jauh lebih berkecukupan, andaikata potongan yang mereka terima tetap sama besarnya.²³

Bertolak dari penjelasan Berger di atas dapat dipahami bahwa, banyak negara di Dunia Ketiga, yang mendapatkan suatu distribusi yang semakin jauh berbeda dalam hal pendapatan dan kekayaan. Hal ini terbukti lewat kelas-kelas bawah yang mendapatkan lebih sedikit dan bukan lebih banyak, saat proses pembangunan kapitalis tersebut berjalan.

Pembangunan seperti ini mengabaikan prinsip partisipasi. Berbeda dengan pertumbuhan ekonomi dan modernisasi, pembangunan adalah kategori moral. Pembangunan bukanlah sesuatu yang harus diputuskan oleh para ahli, karena sama sekali tak ada tenaga ahli mengenai tujuan-tujuan hidup manusia yang sepatutnya dikejar. Pembangunan adalah arah jalan yang patut untuk ditempuh manusia dalam situasi tertentu. Karena itu mereka seharusnya sejauh mungkin berpartisipasi dalam

²³ Mathias Daven, “Politik Pembangunan Dalam Pandangan Peter Ludwig Berger”, (ms), (Mauwere: IFTK Ledalero, 2023).

pilihan-pilihan utama yang harus diambil, pilihan-pilihan yang tidak bergantung pada keahlian teknis, melainkan pada pertimbangan-pertimbangan moral.²⁴

Dari seluruh pembahasan topik ini, penulis ingin menegaskan bahwa kritik Berger atas model ideologi kapitalis sangat relevansi dengan pembangunan pariwisata di Labuab Bajo yang hanya mengorbankan manusia, seperti penggusuran, kemiskinan, perbedaan kaya-miskin yang semakin melebar, pemusatan modal pada segellintir orang saja. Karenanya, sanjungan terhadap pertumbuhan dalam kapitalisme hanyalah bersifat ideologi.

4.2 Pembangunan Menurut Sosialisme

Ideologi sosialis didasarkan pada mitos revolusi.²⁵ Sistem sosialisme mencita-citakan revolusi politik yang berarti pembebasan manusia dari tekanan kaum kapitalis dan sekaligus menghapus ketidakadilan, ketidakmerataan, yang terdapat dalam masyarakat kapitalis yang berkelas. Ideologi pembangunan sosialis membayangkan penyelamatan sesudah revolusi besar. Penyelamatan dalam versi sosialis adalah pembebasan dari kapitalisme, persamaan hak dan kesetiakawanan, kolektivisme, dan penghapusan milik pribadi, penghapusan ketidakadilan. Singkatnya impian pembebasan melalui revolusi sosialis.

Model pembangunan sosialis menurut Berger, telah memunculkan sentralisasi birokrasi. Sentralisasi birokrasi ini berpengaruh pada monopoli birokrasi pemerintah dalam mengambil peranan setiap usaha pembangunan. Hal ini berdampak pada konsentrasi kekuasaan birokrat, dalam pengambilan setiap kebijakan pembangunan yang cenderung menghalangi tiap-tiap usaha untuk mencapai sesuatu. Alhasil, tidak mengherankan jika program-program pembangunan tidak mendatangkan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi semua masyarakat.²⁶ Dengan kata lain, modal sosialis tersebut memiliki suatu kecenderungan inheren untuk kembali pada kebiasaan-kebiasaan ekonomi yang buruk dan tidak efisien sebagai mana yang terdapat dalam sistem sosial pra-modern.

Hal ini terjadi bukan hanya di negara-negara yang menggunakan model kapitalis melainkan juga di negara-negara yang menggunakan sosialis, salah satu negara sosialis (Uni Soviet) yang mendominasi negara-negara sosialis yang lain, dan negara dominan ini dimotivasi oleh kepentingan ekonomi negara itu sendiri, sebagai mana

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Revolusi yang dimaksud ddalam pembangunan ialah sebuah kata dengan janji yang sangat emosional. Kata itu menimbulkan bayanagan akan suatu suatu penyelamatan yang sesusah diambilnya tindakan kekerasan yang menyucikan. Dengan kata lain, banyanagan itu mirip dengan perang, dengan sedikit kekecualian bahwa para pelaku yang dibayangkan, dapat dikatakan tidak berseragam. Peter L. Berger, *Op.cit.*, hlm. 81.

²⁶ Sirilus Stefanus Bau, *Op.cip.*, hlm. 48.

yang terjadi di negara kapitalis. Dengan demikian sebuah negara Dunia Ketiga yang dikuasai oleh kekuatan ekonomi Soviet akan melihat bahwa keputusan-keputusan ekonominya penting tidak berbuat secara otonom, ketergantungan terus-menerus meningkat, keseimbangan perdagangannya buruk dan untungnya meningkat.

Sosialisisme bagi Berger mengandung suatu kecenderungan inheren ke arah totalitarianisme alasannya sederhana karena “Sosialisme pada dasarnya akan berusaha untuk menyerap perekonomian dalam negara, dan dengan demikian sangat meningkatkan potensi totaliter ke dalam tangan Negara.”²⁷ Kecenderungan totaliter ini dengan semua risiko yang menyertai kekuasaan yang tidak dibatasi dan lalin, haruslah diperhitungkan sebagai salah satu kemungkinan biaya-biaya politik tinggi dalam sosialisisme. Rejim sosialis menggunakan strategi terror seperti lasimnya di China dan Unisoviet

Berger menggunakan pembangunan di Cina sebagai contoh pembangunan sosialis. Menurut Berger selama rezim sosialis, Cina berhasil mengikis kelaparan. Selama 150 tahun kaum sosialis (kaum komnunis) adalah kelompok pertama yang membentuk suatu otoritas pusat yang kuat di seluruh negeri itu, yang memungkinkan mereka untuk menjalankan berbagai usaha untuk mengatasi kelaparan yang sanat sulit dilakukan selama ini.²⁸

Berger menekankan bahwa kontradiksi pokok dalam sistem-sistem sosialis yang menyatakan diri dalam fakta politik ini, kontradiksi dari suatu diktatur yang mendefenisikan dirinya sebbagai demokrasi. Hal itu dapat diuraikan dalam ungkapan sebagai berikut: “Semua sistem ini dikuasai oleh elite-elite politis, sehingga tidak mengherankan, makin lama makin berkuasa, mereka makin menindas setiap masyarakat yang berada dalam pengawasan tersebut.”²⁹ Hal ini menunjukkan bahwa dorongan ke arah kekuasaan membawa serta ancaman mutlak dan membuak peluang bagi praktik KKN.

Konsep pembangunan tersebut mengandung makna dan nilai pada dirinya sendiri. Orang-orang harus ditanya sebelum menerapkan suatu model pembangunan. Pembangunan pariwisata di Labuan Bajo tidak semata-mata dilakukan tanpa kesepakatan antara kapitalisme, sosialisisme dan masyarakat lokal. Oleh sebab itu, apa yang diperkenalkan oleh Berger melalui konsep ini adalah kultus moral; manusia tidak boleh semata-mata sebagai suatu objek, mereka harus diperlakukan dengan hormat sesuai dengan harkat dan martabat mereka.

Usaha untuk membongkar kepalsuan dalam dua mitos: mitos pertumbuhan dalam kapitalisme dan mitos revolusi dalam sosialisisme. Usaha pembongkaran kepalsuan itu dituntun oleh dua jenis pertanyaan mengenai perhitungan biaya- biaya

²⁷ Peter L. Berger *Op.cit.*, hlm. 86.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 93.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 98.

manusiawi, yaitu: siapa mengambil manfaat dan siapa yang mengambil keputusan dalam dua jenis model tersebut. Dengan tesis ke-17, Berger merumuskan hal ini dengan jelas: Biaya-biaya manusiawi yang paling menekan adalah yang berkenaan dengan kekurangan dan penderitaan fisik. Tuntutan moral yang paling mendesak dalam pengambilan kebijaksanaan politik adalah suatu *perhitungan kesengsaraan*.³⁰ Jadi, yang selalu harus diperhitungkan adalah penderitaan yang harus dipikul manusia.

4.3 Perhitungan Penderitaan Manusia

Tema pembangunan sebagai pembebasan manusia dari penderitaan hendak menempatkan penderitaan sebagai etika dasar politik pembangunan. Dengan pendasaran seperti ini, semua kebijakan, konsep, dan strategi pembangunan akan dinilai secara etis apakah dia sanggup meniadakan atau membaskan manusia dari penderitaan atau tidak. Maka menurut pendekatan ini, pembangunan merupakan usaha pembebasan manusia dari penderitaan.³¹

Pembangunan memang selalu mengakibatkan korban dan penderitaan bagi manusia. Penderitaan manusia pertama-tama dan terutama adalah pengalaman, yaitu sebagai suatu yang selalu bersifat langsung dan spontan dan baru sesudahnya dirumuskan dan dipikirkan lebih lanjut. Ciri khas pengalaman penderitaan adalah bahwa penderitaan pada dirinya sendiri mengandung tuntutan supaya diubah dan diatasi. Tuntutan ini pun bersifat langsung dan spontan. Artinya, mendahului segala penalaran kita dan pada pokoknya tidak disanksikan oleh siapapun. Artinya dalam keadaan penderitaan menjadi tampak secara dialektis apa yang harus di tujukan dandiusahakan.³² Inilah kenyataan paradoksial sebuah sukses yang sulit dielakkan bila hendak meraih sukses. Menurut Berger korban manusia dalam pembangunan itu hanya bisa dielakkan bila setiap kebijaksanaan politik pembangunan senantiasa memperhitungkan penderitaan manusia.³³ Maka, dalam konteks itulah Berger mengajukan pengandaian-pengandaian nilai dalam pembangunan:

Diandaikan bahwa kebijaksanaan politik seharusnya menjauhi tindakan-tindakan yang menimbulkan penderitaan. Selanjutnya, diandaikan bahwa dalam kasus-kasus di mana kebijaksanaan politik melibatkan penderitaan, baik yang ditimbulkan secara aktif maupun

³⁰ Mathias Daven, "Politik Pembangunan Dalam Pandangan Peter Ludwig Berger", *Loc. cit.*

³¹ Benny Denar, *Mengapa Gereja Harus Tolak Tambang? Sebuah Tinjauan Etis, Filosofis, Teologis, atas Korporasi Tambang*, (Maumere: Penerbit Ledalero, 2015), hlm. 79.

³² Johannes Müller, "Wissenschaftliche Arbeitsgruppe für weltkirchliche Aufgaben der Deutschen Bischofskonferenz (Hrsg.), *Die Vielen Geschichten der Globalisierung*"...op.cit. hlm. 46-48; lihat Mathias Daven dalam, *Entwicklungspolitik*. op.cit., 105-109. <http://repository.iftkledalero.ac.id/id/eprint/1461>. (diakses pada tanggal 03 Maret 2024).

³³ Bernardus Badj, "Pembangunan Pespektif Peter L. Berger" *Pos Kupang*, 13 Februari 2023.

diterima secara pasif, maka kenyataan ini membutuhkan suatu pembenaran dan suatu keharusan yang lebih bersifat moral dari pada teknis.³⁴

Bukunya *Piramida Kurban Manusia* merupakan respons Peter L. Berger terhadap Kapitalisme dan Sosialisme yang sama-sama tidak memperhitungkan “biaya-biaya manusiawi” sehingga manusia menjadi korban dalam setiap pengambilan kebijaksanaan pembangunan. Gagasan pertumbuhan ekonomi dalam ideologi Kapitalisme tidak saja melahirkan ketidakadilan dan kesenjangan sosial karena tidak jelas siapa yang diprioritaskan dalam pembangunan, melainkan juga memicu kerusakan ekologis yang tinggi dan mengabaikan prinsip keadilan terhadap generasi mendatang.³⁵ Di pihak lain penerapan ideologi sosialisme mengakibatkan ketidaknyamanan hidup karena senjata teror yang dipakai untuk mengatur pencapaian perubahan masyarakat. Demi tujuan perubahan ini yang dirancang elite pembangunan, penderitaan manusia sekarang ini dalam segala bentuknya dibenarkan. Kedua ideologi ini sama-sama tidak memperhitungkan penderitaan manusia dalam pelbagai bentuknya.

Sebagai alternatif, Peter L. Berger mengajukan kriteria etis yang harus dipertimbangkan dalam setiap kebijakan pembangunan, yakni perhitungan penderitaan (*calculus of pain*). Perhitungan penderitaan yang dimaksudkan oleh Berger merujuk pada berbagai penderitaan fisik yang kerap muncul akibat pembangunan seperti: kemiskinan, ketidakadilan, ketidakmerataan pendapatan, penindasan akibat pembangunan. Penerapan kapitalisme dan sosialisme sebagai panduan pembangunan harus dibayar mahal dengan bencana kelaparan dan teror politik.

4.4 Perhitungan Makna Manusia

Untuk menguraikan topik ini, didahului dengan sebuah pengandaian nilai yang dianjurkan oleh Berger yakni: Manusia berhak hidup di dalam sebuah dunia yang mengandung makna. Menghormati hak ini merupakan suatu keharusan moral bagi kebijaksanaan politik.³⁶

Manusia memang selalu membutuhkan makna dalam hidupnya. Kebutuhan akan makna hampir pasti berakar di dalam hakikat manusia, sebab manusia adalah makhluk yang memproyeksikan makna ke dalam alam semesta.³⁷ Hal ini menunjukkan bahwa manusia selalu memberikan makna kepada kehidupannya. Dalam hidupnya, manusia bukan hanya bersandar pada barang-barang material saja. Seperti perkataan

³⁴ Peter L. Berger, *Op.cit.*, hlm. 160.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 184-185.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 192.

³⁷ Peter L. Berger dan Thomas Lucmann, *The Social Construction of Reality* (Garden City, N. Y: Doubleday, 1966), hlm. 134.

Yesus yang tragis:” manusia tidak hidup hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari multu Allah” (Mat 4:4).

Hal ini seperti pada pendekatan pembangunan tidak semata-mata hanya untuk mendapatkan barang material, tapi pembangunan harus selalu memperhitungkan makna hidup manusia itu sendiri. Kebijaksanaan pembangunan harus dapat menghargai nilai-nilai masyarakat setempat. Setiap kebijaksanaan politik yang akan diturunkan mesti sanggup mendefenisikan situasi riil kehidupan masyarakat, sehingga dengan itu tidak terjadi “perlawanan terhadap pembangunan” atau kontra-modernisasi.

Kebutuhan akan makna mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi kognitif dan normatif. Artinya manusia harus mengetahui apa adanya dan apa yang seharusnya. Dimensi kognitif menyangkut fakta dan dimensi normatif meyangkut nilai. Dimensi kognitif memberitahukan kepada anggota masyarakat di mana mereka berada, yang terakhir mengarahkan apa yang mereka harus lakukan. Keduanya saling terkait. Suatu moralitas tak mungkin masuk akal tanpa disertai “peta kognitif”. Kedua dimensi makna ini saling menunjang.³⁸

Perhitungan makna (*calculus of meaning*) merujuk pada pertimbangan hilangnya makna atau pengetahuan masyarakat atas kearifan lokal, kebudayaan dan peradaban yang mereka miliki. Kebudayaan harus menyiapkan kerangka orientasi yang merupakan hasil proses sejarah yab lama dan memberi makna pada kehidupan serta mengarahkan tingkah laku. Bukan untuk dihilangkan dan dieksploitasi, tetapi tradisi harus dilindungi. Jika Mengabaikan tradisi dalam pembangunan akan menyebabkan kevakuman nilai, padahal manusia memiliki hak untuk hidup dalam suatu dunia penuh makna. Pembangunan dengan mengabaikan aspek budaya akan gagal dan memaksa manusia hidup dalam suatu dunia tanpa makna.

Oleh sebab itu, Berger menganjurkan pendekatan pembangunan yang humanistis, yang berarti sikap hormat terhadap nila-nilai dan makna-makna dalam kehidupan manusia itu sendiri. Sikap humanistis, niscya segala kebijaksanaan pembangunan tidak akan berhasil, sebaliknya hanya menghasilkan frustrasi dan perlawanan hebat dari pihak rakyat serta menciptakan konteks baru bagi perutusan agama-agama termasuk agama Katolik.

³⁸ Mathias Daven, “Politik Pembangunan Dalam Pandangan Peter Ludwig Berger”, *Loc. cit.*

5. Pandangan Gereja Katolik³⁹

Pendekatan negatif dalam pemikiran Berger tentang politik pembangunan yaitu usaha pembebasan manusia dari penderitaan menyediakan tolok ukur untuk menilai kehadiran agama-agama dewasa ini. Sejarah mencatat bahwa agama-agama juga menjadi basis legitimasi untuk membenarkan masalah penderitaan manusia seperti; kemiskinan, kelaparan, dan ketertinggalan. Fakta ini menunjukkan bahwa agama bersifat ambivalen. Kesadaran akan ambivalensi agama ini sangat membantu umat beragama mengembangkan potensi konstruktif dalam agama-agama untuk menopang wawasan kemanusiaan universal, serta menyikapi secara kritis aspek *in human* dalam tradisi mereka masing-masing.

Terutama dalam konteks globalisasi sekarang ini, kesadaran akan ambivalensi agama dan kebudayaan akan bermanfaat bagi kerja sama dan solidaritas global. Kesadaran akan ambivalensi agama dapat membantu manusia untuk menciptakan suatu tatanan kehidupan yang bermakna yang dapat membebaskan manusia bukan hanya dari dosa, melainkan juga dari akibat-akibat dosa seperti kemelaratan, kemiskinan dan keserakahan.⁴⁰

Bertolak dari penjelasan di atas, misi Gereja Katolik berkisar untuk membawa para korban dan para penderita keluar dari penderitaannya. Gereja Katolik sadar akan pangilannya di dunia, seperti yang digemakan dalam salah satu dokumen Konsili Vatikan II yaitu *Gaudium et spes* yang mengatakan bahwa “kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Yesus”.⁴¹ Artinya bahwa gereja Katolik masa kini terlibat dalam kehidupan dunia. Gereja merasa mengingkari hakikat panggilannya ketika memilih diam terhadap kenyataan ketidakadilan, dalam konteks ini pembangunan pariwisata di Labuan Bajo, gereja merasa terpanggil sekaligus ditantang untuk membela dan memperjuangkan umat yang tidak adil dalam pembangunan.

Gereja berjuang untuk mempersoalkan masalah pembangunan sebagai bagian dari masalah pastotal dan terus dilakukan agar para penguasa tidak sewenang-wenang menindas masyarakat sebagai bagian dari kegemalaan gereja. Gereja menyadari bahwa eksistensinya di dunia ini untuk melanjutkan tugas pengembalaan dari Sang Guru Ilahi yakni Yesus. Gereja katolik memperjuangkan nasib masyarakat miskin dan menderita akibat pembangunan, dalam konteks ini pembangunan pariwisata di Labuan Bajo.

³⁹ Bernardus Badi, *Loc. cit.*

⁴⁰ Mathias Daven, “Politik Pembangunan Dalam Pandangan Peter Ludwig Berger”, *Loc. cit.*

⁴¹ Robert Mirel, “Masalah Sebagai Masalah Pastoral”, dalam Alex Jebadu, at.al, (ed) *Pertambahan di Flores-Larantuka: Berkah atau Kutuk* (Mauwere: Penerbit Ledalero, 2009), hlm. 369.

Dalam Ajaran Sosial Gereja (ASG) melalui Ensiklik *Rerum Novarum*, *Quadragesimo anno*, *Octogesima adveniens*, *Laborem exercens*, *Sollicitudo rei socialis* dan *Centesimus Annus* bertujuan untuk memperjuangkan kehidupan sosial bagi kaum miskin yang tertindas akibat ketidakadilan. Gereja (para gembala) tidak dilihat sebagai pelayanan yang bersigat rohani, melainkan juga memperjuangkan HAM, dari kaum terpinggirkan dan memperjuangkan nasib yang miskin dan menderita akibat ketidakadilan yang dilakukan oleh para penguasa.⁴² Oleh sebab itu, penderitaan manusia merupakan tantangan bagi karya pastoral gereja Katolik di tengah arus pembangunan pariwisata di Labuan Bajo.

D. Kesimpulan

Strategis pembangun pariwisata di Labuan Bajo-Manggarai Barat, pemerintah, gereja dan oraganisasi-organisasi mesti memperjuangkan keadilan, kedamaian, keutuhan ciptaan, melindungi hak-hak asasi manusia, memperhatikan masyarakat yang dipinggirkan dan yang berkekurang akibat dampak dari pembangunan pariwisata, serta kepentingan ekonomi masyarakat melalui penciptaan regulasi penguasaan lahan. Bukan untuk menciptakan wacana-wacana kebijakan yang merugikan masyarakat. Sebab pembangunan pada hakikatnya yang terdalam untuk membebaskan manusia dari penderitaan dan untuk kesejahteraan manusia itu sendiri. Karena itu, sumbangan pembangunan yang dianjurkan Berger adalah etika humanistik yang mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan dalam pembangunan.

Daftar Pustaka

- Berger, Peter L. dan Luckman, Thomas. *The Social Construction of Reality*. Garden City, N. Y: Doubleday, 1966.
- Berger, Peter L. *Piramida Kurban Manusia: Etika Politik dan Perubahan Sosial*. Penerj. A. Rahman Toleng. Jakarta: Penerbit Pustaka LP3ES, 2004.
- Bau, Sirilus Stefanus. "Etika Politik Pembangunan Menurut Peter L. Berger. Skripsi IFTK Ledalero, 2022.
- Ceunfin, Frans. "Etika", (ms). Maumere: IFTK Ledalero, 2013.
- Denar, Benny. *Mengapa Gereja Harus Tolak Tambang? Sebuah Tinjauan Etis, Filosofis, Teologis, atas Korporasi Tambang*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2015.

⁴² Eddy Kristiyanto, *Diskursus Sosial Gereja Katolik Sejak Paus Leo XIII* (Malang: Peberbit Dioma, 2006), hlm. Vii-x.

- _____. “Sisi Antagonis Pembangunan dan Opsi Dekolonial Dalam Teologi Katolik” dalam Mathias Daven dan Georg Kirchberger, ed. *Hidup Sebuah Pertanyaan Kenangan 50 Tahun STFK Ledalero*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2019.
- Daven, Mathias. “Politik Pembangunan Dalam Pandangan Peter Ludwig Berger”, (ms). Maumere: IFTK Ledalero, 2023.
- Kristiyanto, Eddy. *Diskursus Sosial Gereja Katolik Sejak Paus Leo XIII*. Malang: Peberbit Dioma, 2006.
- Mirsel, Robert. “Masalah Sebagai Masalah Pastoral”, dalam Alex Jebadu, at.al, (ed) *Pertambangan di Flores-Larantuka: Berkah atau Kutuk*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2009.
- Qori’ah, Sityi M. “Marginalisasi di Kota Labuan Bajo”, dalam Tim Penyusun. *Pariwisata, Pembangunan, dan Keadilan Agraria di Flores*. Manggarai Barat: Penerbit Divisi Riset dan Publikasi Sunspirit for Justice and Peace, 2016.
- Regus, Max. “Membongkar Aib Pembangunan”, dalam Paul Budi Kleden, Otto Gusti Madung, dan Anselmus Meo, ed. *Allah Menggugat Allah Menyembuhkan*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2012.
- Sastraprateja, M. et al, ed. *Menguak Mitos-Mitos Pembangunan*. Jakarta: Gramedia, 1986.
- Sedarmayanti, Hj., S. Sastarayuda, H. Gumelar., dan Afriza, Lia. *Pembangunan dan Pengembangan Pariwisata*. Bandung: Percetakan Refika Aditama, 2021.
- Badj, Bernardus. “Pembangunan Pespektif Peter L. Berger” Pos Kupang, 13 Februari 2023.
- Baghi, Selivino Koe, ed. “Tumbul-tumbul Pembangunan: Kontroversi Pariwisata Super Premium Labuan Bajo” <http://ekorannt.com/2020/10/03/tumbal-tumbal-pembangunan-kontroversi-pariwisata-super-premium-labuan/bajo/>. (Diakses pada tanggal 27 Januari 2024).
- Daven, Mathias. “Globalisasi dan Pariwisata Sebagai Fenomen Kebudayaan”. Jakarta: Penerbit Obor. <http://repositrory.iftkledalero.ac.id/id/eprint/1461.pdf> (diakses pada tanggal 03 Maret 2024).
- Gunawan, Heru. “Strategi Pengembangan Pariwisata Bandungan Kabupaten Semarang”. *Jurnal Widya Praja*. Vol. 2, No. 1, Juni 2022.
- Heryati, Yati. “Potensi Pengembangan Obyek Wisata Pantai Tapandullu di Kabupaten Mamuju”. *GROWTH Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*. Vol. 1, No, 1, 2019.
- Hasan Basri, Moh. “Pengembangan Pariwisata Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Sumenep”. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah*. Vol. 3, No. 2, Agustus 2019.aZ
- Mebri, Fredrick Hendrick., Suradinata, Ermaya., dan Kusworo. “Strategi Pengembangan Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Jayapura Provinsi Papua”. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*. Vol. 12, No. 1, Juni 2022.

-
- Müller, Johannes. “Wissenschaftliche Arbeitsgruppe für weltkirchliche Aufgaben der Deutschen Bischofskonferenz (Hrsg.), Die Vielen Geschichten der Globalisierung”, dalam Matias Daven, *Globalisasi dan Pariwisata Sebagai Fenomen Kebudayaan* <http://repository.iftkledalero.ac.id/id/eprint/1461>. pdf (diakses pada tanggal 03 Maret 2024).
- SBM, Nugroho. “Beberapa Masalah Dalam Pengembangan Sektor Pariwisata di Indonesia”. *Jurnal Pariwisata*. Vol. 7, No. 2, Agustus 2020. <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/jp>. pdf (diakses pada tanggal, 28 Februari 2024).